



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Investasi China Di Asean Pasca Perang Dagang: Akselerasi Industrialisasi Atau Konsolidasi Ketergantungan Asimetris?

Fauzi Firdaus¹, Hosea Immanuel Manao², Imel Amanda Maharani Batubara³, Nabila Fathia Hasan⁴, Septania Lowisten Manik⁵

¹Universitas Riau, Riau, Indonesia, fauzi.firdaus1786@student.unri.ac.id

²Universitas Riau, Riau, Indonesia, hosea.immanuel2221@student.unri.ac.id

³Universitas Riau, Riau, Indonesia, imel.amanda0183@student.unri.ac.id

⁴Universitas Riau, Riau, Indonesia, nabila.fathia0160@student.unri.ac.id

⁵Universitas Riau, Riau, Indonesia, septania.lowisten0181@student.unri.ac.id

Corresponding Author: fauzi.firdaus1786@student.unri.ac.id

Abstract: *This study examines the increase of China's investment in the ASEAN region following the United States - China trade war in 2018. The main objective is to analyze whether this rise in investment has accelerated industrialization in ASEAN or instead strengthened uneven economic dependence. This research uses a qualitative approach based on secondary data, including academic books, journal articles, and official reports. The analysis focuses on changes in investment flows, the relocation of production activities, and the role of regional economic cooperation frameworks such as the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). The findings indicate that the growth of China's investment has not fully led to strong industrial development in ASEAN countries. Instead, it mainly reflects the relocation of production activities without significant technology transfer. In addition, the imbalance in trade relations suggests that ASEAN countries remain dependent on China. Therefore, this phenomenon tends to reinforce economic dependence rather than promote sustainable industrialization.*

Keyword: *China's Investment, ASEAN, Trade War, Industrialization, Economic Dependence.*

Abstrak: Penelitian ini membahas peningkatan investasi Tiongkok di kawasan ASEAN setelah terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2018. Fokus utama penelitian ini adalah untuk melihat apakah peningkatan investasi tersebut mendorong proses industrialisasi di ASEAN atau justru memperkuat ketergantungan ekonomi yang tidak seimbang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder, seperti buku, artikel ilmiah, dan laporan resmi. Analisis dilakukan dengan melihat perubahan aliran investasi, perpindahan lokasi produksi, serta peran kerja sama ekonomi regional seperti ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan investasi Tiongkok belum sepenuhnya mendorong perkembangan industri yang kuat di negara-negara ASEAN. Sebaliknya, yang terjadi lebih banyak berupa pemindahan kegiatan produksi tanpa diikuti oleh transfer teknologi yang berarti. Selain itu, hubungan perdagangan yang tidak

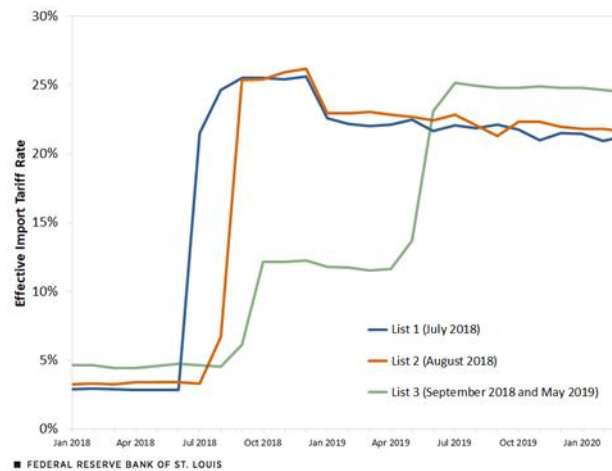
seimbang juga menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN masih bergantung pada Tiongkok. Oleh karena itu, fenomena ini lebih mengarah pada meningkatnya ketergantungan ekonomi dibandingkan dengan percepatan industrialisasi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Investasi China, ASEAN, Perang Dagang, Industrialisasi, Ketergantungan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Perang Dagang Amerika Serikat - China

Dalam beberapa tahun terakhir, struktur dan alur permainan perdagangan global mengalami perubahan yang signifikan yang diakibatkan oleh konflik perdagangan internasional antara negara-negara besar, dan yang paling krusial di antaranya adalah perang dagang antara Amerika Serikat dan China terutama pada tahun 2018. Pada fundamentalnya, Amerika Serikat (AS) memberlakukan kenaikan tarif impor terhadap China pada tahun 2018 dilandaskan oleh besarnya peran China di dalam defisit perdagangan internasional AS (Emilio, 2022). Defisit neraca perdagangan sendiri merujuk kepada kinerja ekonomi suatu negara yang menunjukkan lebih besarnya impor ketimbang ekspor yang dapat membebani nilai tukar, anggaran dan hutang suatu negara (Zein et al., 2026). Dalam hal ini, AS yang meninjau kembali neraca perdagangannya dan menemukan bahwa China berperan besar di dalam eskalasi ketimpangan, memutuskan untuk menaikkan tarif bea impor masuknya barang China ke dalam pasar AS.



Gambar 1. (REPRESENTATIVE & PRESIDEN, 2018) Naiknya tarif impor AS terhadap China di kuartal ke-II tahun 2018.

Dalam lanskap ilmu hubungan internasional, aksi yang diambil oleh AS pada masa ini dapat dikategorikan sebagai langkah untuk melindungi negaranya terhadap ketergantungan dan defisit neraca perdagangan internasional yang ditimbulkan melalui impor dari China (Zein et al., 2026). Namun, langkah ini juga membawa dampak signifikan di dalam perdagangan internasional China.

Polemik utamanya ada di dalam barang-barang hasil manufaktur yang dikenakan tarif impor oleh AS terhadap China. Yang artinya, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh China sebagai aktor negara, namun perusahaan-perusahaan internasional yang bergerak di dalam manufaktur industri yang ada di China dan memproduksi instrumen dasar manufaktur yang dibuat oleh China. Produk-produk yang disasar oleh Amerika Serikat, yang sangat krusial seperti: Teknologi dari industri strategis (komponen semikonduktor, peralatan robotik, mesin industri, teknologi komunikasi, *Aerospace component*). Mesin dan manufaktur, Material industri, hingga baja dan aluminium (Representative, 2018) Hal ini, secara langsung membawa

dampak buruk terhadap perusahaan China dan perusahaan-perusahaan internasional yang ada di China, karena berada di dalam kondisi kehilangan pasar besar di AS dan total margin.

Implokasi dari naiknya tarif impor AS ke China menjatuhkan niat investasi perusahaan internasional yang ada di China. Kerugian yang dicapai juga sangat besar hingga tingkat mikro, seperti margin laba rata-rata perusahaan di China turun 0.35% setiap 1% kenaikan tarif yang diberikan oleh AS. Di sisi lain secara makro, di dalam lingkup 20.000 perusahaan yang ada di China: 72.7% perusahaan tidak dapat menurunkan harga keran margin sudah sangat tipis, 59.3% tidak memiliki pasar alternatif selain AS dan 46.6% tidak dapat mengalihkannya ke pasar domestik (Jiao, Yang, Liu, Zhikuo, Tian, Zhiwei, Wang, 2022). Sehingga konklusinya dapat dilihat bahwa China mengalami '*market-rigidity*'.

Migrasi Perusahaan China ke ASEAN

Melihat fenomena kekeringan ekonomi tersebut, China harus mampu memberikan jalan keluar di dalam permasalahan ekonomi politik internasional yang terjadi antara China dan AS. Dalam hal tersebut negara-negara ASEAN yang relatif memiliki biaya produksi lebih rendah, stabilitas ekonomi yang cukup baik, serta keterbukaan terhadap investasi asing, menjadi alternatif strategis bagi China dalam mengalihkan aktivitas produksinya. Pergeseran ini tidak hanya didorong oleh faktor eksternal berupa tarif impor, tetapi juga oleh dinamika internal China seperti meningkatnya biaya tenaga kerja dan berkurangnya keunggulan komparatif dalam sektor manufaktur padat karya (Eugenio Cerutti, Gita Gopinath, 2019).

Lebih lanjut, fenomena ini dapat dipahami melalui strategi diversifikasi produksi yang dikenal sebagai China+1, di mana perusahaan-perusahaan yang sebelumnya berpusat di China mulai memindahkan sebagian basis produksinya ke negara lain untuk mengurangi risiko geopolitik dan biaya produksi. Dalam hal ini, ASEAN menjadi pilihan utama karena kedekatan geografis yang memungkinkan integrasi rantai pasok tetap terjaga, serta kemudahan akses terhadap pasar global tanpa dikenakan tarif tinggi seperti yang dialami China. Negara-negara seperti Vietnam, Indonesia, dan Thailand secara khusus menjadi tujuan utama relokasi karena memiliki infrastruktur industri yang berkembang serta kebijakan yang mendukung investasi manufaktur. Selain itu, pergeseran ini juga dipengaruhi oleh fenomena *trade diversion*, di mana produksi dialihkan ke negara yang tidak terkena tarif untuk mempertahankan akses ke pasar utama seperti Amerika Serikat. Dengan memindahkan produksi ke kawasan ASEAN, perusahaan-perusahaan China tetap dapat mengekspor barang ke pasar global dengan biaya yang lebih kompetitif. Hal ini menunjukkan bahwa migrasi perusahaan ke ASEAN bukan sekadar ekspansi ekonomi, melainkan merupakan bentuk adaptasi strategis terhadap perubahan struktur perdagangan global (Amiti et al., 2018).

Peran ACFTA (ASEAN China Free Trade Area) di Dalam Relokasi Perusahaan

Keberadaan ASEAN-China Free Trade Area menjadi faktor penting yang mendorong perusahaan dari China untuk pindah ke kawasan ASEAN, terutama setelah perang dagang dengan Amerika Serikat memanas pada tahun 2018. Dengan mengurangi dan menghapus tarif di dalam kawasan, ACFTA membuat lingkungan perdagangan yang lebih efisien dan kompetitif bagi perusahaan. Mereka bisa memindahkan basis produksi tanpa harus menghadapi hambatan tarif yang tinggi. Perusahaan China bisa menggunakan negara-negara ASEAN sebagai lokasi produksi alternatif yang lebih murah, sambil tetap terhubung dengan jaringan perdagangan regional yang luas (Zhai, 2023).

Selain itu, ACFTA juga membantu proses restrukturisasi rantai nilai global, di mana proses produksi tidak lagi terpusat di satu negara, tapi tersebar di beberapa negara untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko. Dengan menggunakan skema perdagangan bebas dalam ACFTA, perusahaan bisa memindahkan sebagian proses produksi ke ASEAN dan tetap menjaga akses ke pasar global dengan kompetitif, termasuk menghindari tekanan tarif dari luar. Sebuah studi oleh Zhang pada tahun 2020 menunjukkan bahwa implementasi ACFTA

secara signifikan meningkatkan arus perdagangan dan investasi antara China dan ASEAN, serta mempercepat integrasi rantai pasok regional. Hal ini pada akhirnya mendorong relokasi industri manufaktur ke Asia Tenggara sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan struktur perdagangan global (Zhai, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis dinamika kerja sama ekonomi antara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dan China dalam konteks perubahan ekonomi global pasca *US-China Trade War* pada periode 2017–2018. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena ekonomi-politik, khususnya terkait hubungan ketergantungan, distribusi kekuasaan negara dalam interaksi internasional.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, meliputi buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan resmi organisasi internasional, serta publikasi berita dan data statistik perdagangan. Data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pola perubahan investasi dan perdagangan, khususnya peningkatan *Foreign Direct Investment* (FDI) China ke kawasan ASEAN setelah terjadinya perang tarif antara China dan Amerika Serikat.

Ruang lingkup (*scope*) penelitian ini difokuskan pada dampak perang tarif Amerika Serikat - China pada periode 2017–2018 terhadap pergeseran investasi China ke kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini secara khusus menganalisis bagaimana kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat mendorong relokasi produksi dan investasi China ke negara-negara ASEAN, serta implikasinya terhadap struktur ekonomi regional. Dengan demikian, penelitian ini tidak membahas seluruh dinamika hubungan ASEAN - China secara umum, melainkan berfokus pada periode dan fenomena spesifik yang mempengaruhi perubahan pola investasi dan perdagangan.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi pola hubungan antara peningkatan investasi China dan kondisi ketergantungan ekonomi di ASEAN. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teori ekonomi politik internasional, khususnya konsep *asymmetric interdependence* yang dikemukakan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye, serta konsep *economic statecraft* sebagaimana dijelaskan oleh Robert D. Blackwill dan Jennifer M. Harris. Selain itu, penelitian ini juga membahas konsep hegemoni ekonomi untuk memahami bagaimana dominasi ekonomi China di kawasan ASEAN dapat membentuk struktur hubungan yang tidak seimbang. Melalui penggunaan kerangka teori tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah peningkatan investasi China di ASEAN setelah perang dagang mendorong proses industrialisasi atau justru memperkuat ketergantungan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Teoritis

Analisis tentang dinamika investasi China di Asia Tenggara dalam tulisan ini menggunakan perspektif Merkantilisme Baru yang dikemukakan oleh Robert Gilpin (2001). Dalam pandangan teori ini, sistem ekonomi politik internasional dilihat sebagai arena yang kompetitif, di mana negara-negara memanfaatkan instrumen ekonomi untuk memperkuat kekuasaan dan menjaga keamanan nasionalnya. Berbeda dengan pandangan liberalisme yang melihat bahwa perdagangan bebas sebagai alat dan jalan untuk mencapai kesejahteraan bersama, Merkantilisme baru menekankan bahwa kekayaan ekonomi dan kekuasaan politik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, di mana aktivitas ekonomi tetap diarahkan untuk tetap mendukung dan berada di bawah kepentingan strategis negara (Gilpin, 2001). Oleh karena itu, kerja sama integrasi ekonomi seperti ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA)

tidak bisa dilihat hanya sebagai upaya efisiensi pasar yang hanya menguntungkan semata, tetapi juga sebagai bagian dari taktik China untuk memperluas pengaruhnya di kawasan dan mengamankan kepentingannya di tengah tekanan global.

Lebih lanjut, interaksi dalam ACFTA sangat dipengaruhi oleh perhitungan Keuntungan Relatif (*Relative Gains*). Menurut Joseph Grieco (1988) dalam sistem internasional yang kompetitif, negara tidak hanya peduli pada keuntungan absolut, tetapi lebih sensitif terhadap siapa yang mendapatkan keuntungan lebih besar. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan seperti *Early Harvest Programme* (EHP), program ini memang terlihat sebagai insentif awal bagi ASEAN, tapi secara jangka panjang justru membuat kawasan semakin terikat dalam rantai pasok yang berpusat pada China. Artinya, meskipun ada peningkatan FDI, China tetap mengamankan keuntungan strategis yang lebih besar untuk mempertahankan hierarki ekonomi regional (Grieco, 1988). Dinamika yang tidak seimbang ini bisa dijelaskan lewat konsep *statecraft* geoekonomi. Menurut Robert Blackwill dan Jennifer Harris (2016), konsep ini menjelaskan bagaimana negara menggunakan instrumen ekonomi seperti kebijakan perdagangan, kontrol rantai pasok, dan investasi-sebagai alat politik untuk mencapai tujuan nasional tanpa harus menggunakan kekuatan militer.

Perspektif ini menunjukkan bahwasanya ekspansi ekonomi China melalui ACFTA setelah perang dagang punya dua fungsi sekaligus. Di satu sisi, langkah ini jadi cara China untuk melindungi ekonominya dari tekanan tarif Amerika Serikat. Tapi di sisi lain, dapat dilihat investasi tersebut menjadi alat untuk memperluas pengaruhnya. Relokasi industri China ke Asia Tenggara bukan sekadar ekspansi bisnis, tapi juga strategi untuk menghindari tarif tinggi dari Amerika Serikat dengan memanfaatkan ASEAN sebagai “jalur alternatif” (Setiawan, 2025). Akibatnya, kekhawatiran akan ketergantungan ekonomi negara-negara Asia Tenggara terhadap China perlahan berubah menjadi ketergantungan politik demi ambisi hegemoni China di kawasan.

Evolusi ACFTA dan Motif Hegemoni

Pembentukan ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA) merupakan bagian dari strategi ekonomi China yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan perdagangan, tetapi juga pada pembentukan pengaruh struktural di kawasan Asia Tenggara melalui integrasi ekonomi regional (Chakraborty & Kumar, 2012). Sehingga sejak awal pembentukannya, ACFTA telah mengandung dimensi geopolitik yang melampaui liberalisasi tarif biasa. Dalam tahap awal implementasinya, *Early Harvest Programme* (EHP) diperkenalkan sebagai mekanisme percepatan liberalisasi dengan memberikan penurunan tarif lebih awal pada komoditas tertentu, terutama sektor pertanian, produk makanan, dan komoditas perikanan, yang secara politis lebih mudah dinegosiasikan dibanding sektor industri manufaktur (Medalla & Balboa, 2007). Strategi ini dapat dilihat sebagai cara pragmatis untuk mengurangi resistensi negara-negara ASEAN terhadap kesepakatan perdagangan bebas yang lebih luas, sekaligus membangun kepercayaan awal dalam proses integrasi ekonomi regional. Lebih lanjut, EHP secara efektif berfungsi sebagai insentif jangka pendek yang meningkatkan volume perdagangan bilateral dan menciptakan persepsi keuntungan langsung bagi negara-negara ASEAN (Zhai, 2023). Peningkatan arus perdagangan ini pada tahap awal sering kali dipersepsikan sebagai keberhasilan liberalisasi, karena memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekspor dan pendapatan sektor tertentu. Namun di balik itu, peningkatan perdagangan tersebut secara bertahap membentuk ketergantungan struktural karena pola ekspor-impor yang cenderung menempatkan ASEAN sebagai pemasok bahan mentah dan pada akhirnya China berhasil memperluas pasar produk manufaktur mereka.

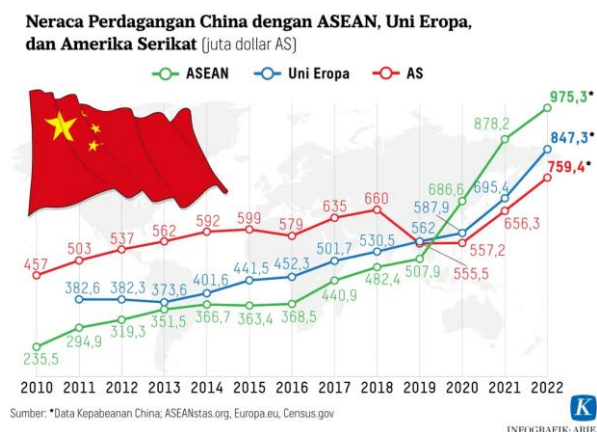
Dari perspektif politik ekonomi internasional, kebijakan ini dapat dipahami sebagai strategi “*embedded hegemony*”, dimana China menggunakan liberalisasi selektif untuk membangun legitimasi sekaligus memperluas pengaruhnya dalam arsitektur ekonomi regional (Chin & Stubbs, 2011). Dalam konteks ini, EHP tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan

ekonomi teknis, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi ekonomi yang memungkinkan China mengunci komitmen negara-negara ASEAN dalam kerangka kerja sama yang lebih luas. Sehingga EHP berperan sebagai fondasi awal yang mempermudah negosiasi tahap lanjutan, termasuk liberalisasi sektor-sektor yang sebelumnya lebih sensitif seperti manufaktur dan jasa. Selain itu, meskipun EHP memberikan manfaat awal akan tetapi dampaknya tidak merata di antara negara-negara ASEAN, karena beberapa negara seperti Indonesia justru mengalami penurunan kinerja sektor tertentu akibat meningkatnya kompetisi dengan produk impor China dimana seringkali produk dari China jauh lebih murah yang pada akhirnya akan menciptakan tekanan yang cukup signifikan terhadap keberlangsungan industri dalam negeri (Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, n.d.). Kondisi ini tidak hanya berdampak pada penurunan daya saing industri lokal, tetapi juga berpotensi menyebabkan deindustrialisasi prematur jika tidak diimbangi dengan kebijakan industrialisasi yang kuat. Dalam jangka panjang, tekanan terhadap industri dalam negeri dapat memicu ketergantungan yang lebih dalam terhadap impor barang manufaktur dari China.

Dalam kerangka tersebut, EHP dapat diinterpretasikan sebagai “umpan manis” (*sweetener strategy*), yaitu strategi pemberian keuntungan jangka pendek guna memperoleh konsesi jangka panjang, khususnya dalam membuka akses pasar manufaktur ASEAN yang lebih luas bagi produk China (Ba & Alice, 2006). Strategi ini mencerminkan pendekatan bertahap dalam liberalisasi perdagangan, di mana konsesi awal digunakan untuk menciptakan momentum politik dan ekonomi bagi integrasi yang lebih dalam, sehingga dalam jangka panjang keuntungan struktural lebih banyak terakumulasi pada pihak yang memiliki kapasitas industri lebih kuat. Dengan demikian, evolusi ACFTA melalui instrumen EHP mencerminkan pola integrasi yang asimetris, di mana liberalisasi awal digunakan sebagai alat untuk mengamankan dominasi ekonomi jangka panjang, terutama melalui penguatan jaringan produksi regional yang berpusat pada China sebagai aktor utama dalam rantai nilai global di kawasan Asia Timur.

Realitas Investasi dan De-industrialisasi

Peningkatan investasi China ke kawasan ASEAN pasca perang dagang Amerika Serikat - China sering dipahami sebagai peluang strategis bagi percepatan industrialisasi di Asia Tenggara. Secara empiris, arus *Foreign Direct Investment* (FDI) menunjukkan tren kenaikan yang signifikan sejak 2018, seiring dengan relokasi produksi untuk menghindari tarif impor dari Amerika Serikat.



Gambar x. tren kenaikan neraca perdagangan China ke ASEAN pada 2019. (MADA, 2023)

Negara-negara seperti Vietnam, Indonesia, dan Thailand menjadi tujuan utama karena menawarkan kombinasi biaya produksi yang lebih rendah, stabilitas ekonomi relatif, serta akses terhadap jaringan perdagangan regional seperti ACFTA. Dalam konteks ini, ASEAN tampak memperoleh posisi baru dalam rantai produksi global sebagai basis alternatif bagi

industri manufaktur yang sebelumnya terpusat di China. Namun demikian, peningkatan investasi tersebut tidak serta-merta mencerminkan transformasi industri yang bersifat mendalam. Relokasi yang terjadi pada dasarnya lebih menunjukkan pemindahan lokasi produksi dibandingkan pemindahan kapasitas industri secara utuh. Aktivitas bernilai tinggi seperti penelitian dan pengembangan (R&D), desain produk, serta kontrol teknologi tetap terpusat di China, sementara ASEAN lebih banyak mengambil peran sebagai lokasi produksi berbiaya rendah. Dengan kata lain, integrasi ASEAN ke dalam sistem produksi global masih berada pada level operasional, bukan strategis. Fenomena ini memperlihatkan bahwa restrukturisasi rantai pasok global yang terjadi pasca perang dagang tetap mempertahankan hierarki lama, di mana pusat kendali industri tidak benar-benar berpindah (Mao, Haiou; Görg, 2019).

Jika ditelaah lebih dalam lagi, lajur investasi China di kawasan ASEAN tidak seutuhnya memberikan proyeksi proses industrialisasi yang benar-benar memperkuat fondasi ekonomi domestik masing-masing negara ASEAN. Hal ini terlihat bias, bahwa memang faktanya terdapat peningkatan aktivitas manufaktur di berbagai negara tujuan FDI, tetapi jenis aktivitas cenderung bergerak di sektor produksi (mempekerjakan manusia). Dalam banyak kasus relokasi industri hanya berada di tahap akhir, seperti perakitan, sedangkan fungsi strategis yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dan pengendalian produksi dari hulu hingga leher hilir tetap dimiliki oleh China. Dengan demikian keterlibatan ASEAN dalam rantai produksi global lebih menyerupai perluasan wilayah operasional akhir, dari pada pergeseran pusat industri itu sendiri (Taguchi & Zhao, 2022).

Dalam pandangan yang lebih terperinci lagi, permainan investasi yang berakar di dalam *host country* menjelaskan dengan gamblang ketiadaannya hubungan antara pergeseran industri dan kemajuan domestik. Hal ini didasari oleh aktivitas industri yang dibawa oleh investor asing cenderung berjalan dengan sistem yang sudah ada dari China. Hal ini mencakup *supply chain* hingga proses distribusi, sehingga keterlibatan pelaku lokal menjadi sangat terbatas, bahkan sangat kecil rasionya. Kondisi ini pada konklusinya menciptakan kamar industri yang eksklusif, di mana interaksi terhadap sektor domestik tidak berkembang signifikan dengan adanya pergeseran industri. Akibatnya, peluang *host country* untuk menjalankan *transfer technology* hingga penguatan SDM dan kapasitas industri lokal menjadi sangat terbatas. Situasi ini memberikan *loop hole* di dalam pergeseran industri ke negara-negara ASEAN. Tidak hanya ketiadaan kemajuan sektor domestik, namun hubungan yang kuat antara investasi, teknologi dan kapasitas lokal terabaikan di dalam pergeseran industri yang dangkal ini. Tanpa adanya keterkaitan antar ketiga hal tersebut, negara penrima FDI hanya akan menjadi pintu masuk China ke pasar AS, ketimbang menjadi produsen itu sendiri (Raicu et al., 2021).

Di sisi lainnya, masuknya investasi hingga produk manufaktur canggih dari China juga membawa konsekuensi yang kritis terhadap industri domestik yang belum mampu semaju China. Produk yang sangat kompetitif melalui harga namun dapat disuplai dengan masal dapat secara langsung menantang keberlangsungan industri domestik. Dalam skenario tersebut, industri domestik tidak hanya kesulitan untuk terus maju dan berkembang, tetapi juga memiliki potensi yang sangat besar untuk mengalami stagnasi, penurunan, hingga kehancuran sebelum mampu untuk mencapai kematangan yang dibutuhkan. Jika dibiarkan terus menerus, lingkungan yang buruk ini dapat membawa sebuah negara *host country* pada indikasi deindustrialisasi yang berlangsung secara perlahan, namun terus ditekan secara sistematis. Dengan demikian, industrialisasi yang terjadi tidak benar-benar memperkuat ekonomi domestik, namun justru membawa kekosongan yang besar di dalam ketidakseimbangan industri (Rodrik, 2016). Fenomena ini membawa pandangan yang lebih kompleks bahwa keterbukaan terhadap sektor investasi tanpa dibarengi kemampuan negara penerima justru akan membawa tantangan struktural dan menjadi bom waktu bagi industri domestik, negara, dan industri China itu sendiri.

Secara konklusi, dinamika ini pada ujungnya akan membawa pola ketergantungan yang berakar secara struktural dan tidak mudah dicabut. Negara-negara ASEAN target industrialisasi hanya menjadi ‘samaran’ bagi China untuk melakukan ekspansi pasarnya di dalam *global supply chain*. Tidak hanya bergantung di dalam aliran modal, tetapi jaringan pasar, serta produksi yang di bawah kendali pihak eksternal. Dalam beberapa waktu ke depan, ketergantungan ini berpotensi membatasi kendali negara terhadap ekonomi yang independen, dan terbebas dari campur tangan negara lain. Oleh karena stabilitas dan pertumbuhan ekonomi sangat ditopang oleh sektor eksternal. Dalam skenario tersebut, hubungan ekonomi antara ASEAN dan China tidak lagi dapat dilihat sebagai kerja sama ekonomi yang saling membawa keuntungan, tetapi juga sebagai relasi yang menyimpan kendali ekonomi berupa ketergantungan eksternal.

Defisit Struktural dan Statecraft Ekonomi

Peningkatan hubungan ekonomi antara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan China menunjukkan tren yang signifikan setelah terjadinya *US - China Trade War* pada periode 2017–2018. Konflik perdagangan antara China dan United States mendorong restrukturisasi rantai pasok global, di mana perusahaan-perusahaan China mulai mengalihkan sebagian aktivitas produksinya ke kawasan Asia Tenggara untuk menghindari tarif perdagangan yang meningkat. Dinamika ini tercermin dalam lonjakan arus *Foreign Direct Investment* (FDI) China ke ASEAN, yang meningkat dari sekitar US\$6,5 miliar pada 2015 menjadi lebih dari US\$15,8 miliar pada 2018, sebelum kembali melonjak hingga US\$17,3 miliar pada 2021 (ASEANstats). Secara sekilas, peningkatan investasi ini dapat dipahami sebagai peluang bagi negara-negara ASEAN untuk mempercepat industrialisasi dan integrasi dalam rantai produksi global.

Tabel 1. Flows of Inward Foreign Direct Investment (FDI) into ASEAN by Source Country (in million US\$)

Host Country	Source Country	Year					
		2015	2016	2018	2019	2020	2021
ASEAN	China [CN]	6.561,94	8.164,01	15.813,60	9.151,07	7.182,60	17.313,92

Sumber: ASEANstats

Namun, peningkatan investasi tersebut tidak diiringi dengan keseimbangan dalam struktur perdagangan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, nilai ekspor China ke ASEAN mencapai sekitar US\$283,2 miliar, sementara impor dari ASEAN hanya sebesar US\$185,6 miliar, yang mengindikasikan adanya defisit perdagangan yang konsisten di pihak ASEAN (China Briefing, 2023). Defisit ini mencerminkan ketergantungan ASEAN terhadap produk manufaktur China, khususnya dalam sektor dengan nilai tambah tinggi. Dengan demikian, meskipun ASEAN menjadi tujuan investasi dan relokasi industri, kawasan ini belum sepenuhnya mengalami peningkatan kapasitas industri yang mampu menyeimbangkan hubungan perdagangan. Sebaliknya, pola yang terbentuk justru menunjukkan integrasi yang bersifat tidak simetris, di mana ASEAN berperan sebagai basis produksi berbiaya rendah sekaligus pasar bagi produk industri China.

Dalam perspektif ekonomi politik internasional, ketidakseimbangan ini dapat dijelaskan melalui konsep *asymmetric interdependence*. Robert Keohane dan Joseph Nye (1997) menekankan bahwa hubungan saling ketergantungan antar negara tidak selalu bersifat simetris, dan justru ketidakseimbangan tersebut dapat menjadi sumber kekuasaan bagi pihak yang kurang bergantung. Dalam konteks ASEAN - China, ketergantungan ASEAN terhadap impor

investasi China menunjukkan posisi yang lebih rentan terhadap tekanan ekonomi. Ketimpangan ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi berpotensi menciptakan ketergantungan structural, di mana negara berkembang cenderung terjebak dalam posisi subordinat dalam sistem ekonomi global.

Ketergantungan ekonomi tersebut dapat dimanfaatkan oleh China sebagai instrumen *economic statecraft*. Menurut Robert D. Blackwill dan Jennifer M. Harris (2016), *economic statecraft* merujuk pada penggunaan alat-alat ekonomi seperti perdagangan dan investasi untuk mencapai tujuan geopolitik dan kepentingan nasional. Dalam konteks ASEAN, China secara aktif menggunakan investasi dan perjanjian perdagangan untuk memperluas akses pasar sekaligus memperkuat pengaruh strategisnya di kawasan. Hal ini juga diperkuat oleh temuan Xue Gong (2017) yang menunjukkan bahwa China secara sistematis menggunakan FDI dan kerja sama ekonomi untuk mempengaruhi keputusan politik negara-negara Asia Tenggara.

Persaingan strategis antara China dan Amerika Serikat, negara-negara ASEAN berada dalam posisi yang semakin kompleks, di mana mereka harus menyeimbangkan hubungan dengan kedua kekuatan besar tersebut sambil mempertahankan prinsip sentralitas ASEAN (Habibie et al, 2025). Namun, ketergantungan ekonomi yang meningkat terhadap China dapat membatasi ruang gerak kebijakan negara-negara ASEAN, karena tekanan ekonomi dapat digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi keputusan politik. Selain itu, perbedaan kepentingan dan kapasitas antar negara ASEAN juga memperumit respons kolektif terhadap pengaruh China. Habibie et al. (2025) menekankan bahwa fragmentasi internal ASEAN dapat dimanfaatkan oleh China. Proyek-proyek dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI) juga memperlihatkan bagaimana investasi infrastruktur dapat menciptakan ketergantungan jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun ketergantungan teknologi.

Secara keseluruhan, defisit perdagangan yang dialami ASEAN dalam hubungannya dengan China tidak dapat dipahami sebagai fenomena ekonomi yang netral. Sebaliknya, defisit tersebut merupakan indikator dari ketidakseimbangan struktural dalam hubungan ekonomi regional yang memberikan China posisi tawar yang lebih kuat. Dalam konteks ini, integrasi ekonomi yang semakin dalam justru berpotensi memperkuat ketergantungan ASEAN, kecuali jika diimbangi dengan strategi industrialisasi yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah domestik. Tanpa upaya tersebut, hubungan ekonomi ASEAN-China akan terus mencerminkan pola *asymmetric interdependence*, di mana ketergantungan ekonomi menjadi sumber kekuasaan bagi China dalam membentuk dinamika regional.

Sinosentrisme Digital dan Energi Hijau

Memahami dinamika hubungan China dan ASEAN memerlukan tinjauan mendalam terhadap akar historis dan ideologis yang membentuk perilaku politik ekonomi China di kawasan tersebut. Sinosentrisme adalah pandangan dunia yang menempatkan China sebagai pusat peradaban dan kekuasaan di kawasan Asia Timur. Konsep ini awalnya berkembang pada masa Dinasti *Qin* dan *Han*, kemudian menguat pada Dinasti *Tang* melalui pengaturan wilayah dan institusi yang menjadikan China sebagai pusat budaya dan politik. Sinosentrisme juga mencakup penggunaan karakter *Han* (*hanzi*) sebagai alat komunikasi tertulis bersama di wilayah yang dikenal sebagai Sinosfer, meliputi China, Jepang, Korea, Vietnam, dan komunitas lain di Asia Tenggara (Wu & Riemenschnitter, 2018). Secara historis, sinosentrisme membentuk hubungan hierarkis antara China dan negara-negara tetangga serta mempengaruhi diplomasi dan pertukaran budaya di Asia Timur. Dalam konteks modern, istilah ini diperluas untuk menggambarkan pengaruh sosial, politik, dan ekonomi China yang semakin besar di kawasan tersebut, meskipun tetap menjadi konsep yang fleksibel untuk menghindari narasi nasionalistik (Wu & Riemenschnitter, 2018). Kini, sinosentrisme dipandang sebagai kerangka identitas budaya sekaligus ideologi politik yang berperan dalam dinamika kekuasaan regional.

Transformasi sinosentrisme tradisional menjadi hegemoni ekonomi modern terlihat jelas melalui pergeseran instrumen kekuasaan dari karakter budaya menuju dominasi teknologi

digital dan hijau. China memanfaatkan transisi ganda global digitalisasi dan dekarbonisasi sebagai "jalur sutra baru" untuk mengamankan kepentingan nasionalnya di tengah anarki internasional. Melalui kebijakan *economic statecraft*, Beijing berupaya menciptakan ekosistem ekonomi yang berpusat pada standar teknologi mereka guna memastikan ketergantungan jangka panjang dari negara-negara mitra di Asia Tenggara. Strategi ini memungkinkan China untuk mempertahankan pengaruhnya tidak lagi hanya melalui kekuatan militer atau budaya, tetapi melalui kontrol terhadap infrastruktur strategis yang menentukan arah masa depan ekonomi kawasan.

Investasi China di ASEAN pasca perang dagang, khususnya melalui ACFTA, menunjukkan dorongan kuat pada sektor digital dan hijau sebagai bagian dari strategi akselerasi industrialisasi kawasan. Pasca-pandemi, China memandang ASEAN bukan hanya sebagai mitra dagang, melainkan sebagai *backyard* strategis untuk menjalankan visi hegemoninya melalui diplomasi ekonomi yang komprehensif (Alfi, Muawal, & Ismail, 2023). Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan transisi ganda global seperti digitalisasi dan ekonomi hijau sebagai instrumen untuk mengunci kawasan ke dalam standar teknologi China. ACFTA 3.0 yang didukung oleh RCEP memperkenalkan aturan baru yang mendorong digitalisasi dan transformasi hijau, meskipun implementasinya menghadapi tantangan seperti kesenjangan digital antar negara ASEAN dan hambatan non-tarif (Yang, Wang, & Sun, 2025). Investasi China dalam infrastruktur digital seperti 5G dan pusat data di ASEAN telah mempercepat transformasi digital regional, namun juga menimbulkan risiko ketergantungan teknologi dan standar yang didominasi oleh China (Paudel, 2025).

Selain itu, pengembangan ekonomi digital di ASEAN terbukti meningkatkan investasi langsung luar negeri (FDI) China di kawasan tersebut, dengan inovasi teknologi dan kualitas institusi sebagai mediator penting (Chen & Chen, 2025). Di sisi lain, meskipun ACFTA meningkatkan aliran FDI secara signifikan, manfaatnya sangat bergantung pada kebijakan domestik masing-masing negara anggota untuk menghindari ketergantungan asimetris yang dapat menghambat kemandirian industrial (Li, Scollay, & Maani, 2016). Oleh karena itu, investasi hijau dan digital China di ASEAN berpotensi mempercepat industrialisasi jika disertai regulasi yang kuat. Jika tidak, hal ini bisa mengkonsolidasikan ketergantungan struktural yang asimetris dalam konteks sinosentrisme ekonomi regional.

Implikasi Geopolitik dan Kedaulatan

Berdasarkan ASEAN *Investment Report 2024*, nilai FDI China ke ASEAN mencapai sekitar US\$17,3 miliar pada tahun 2024, yang sebagian besar digunakan untuk memindahkan fasilitas manufaktur agar bisa menghindari tarif dari Amerika Serikat. Setelah perang dagang antara Amerika Serikat dan China, arus investasi dari China ke kawasan Asia Tenggara meningkat cukup pesat. Lonjakan relokasi industri dan investasi China ke Asia Tenggara setelah Perang Dagang membawa dampak besar terhadap kedaulatan geoekonomi ASEAN. Arus investasi ini semakin terakselerasi ketika muncul tarif baru di sektor teknologi seperti kendaraan listrik (EV) dan semikonduktor, sehingga perusahaan China memanfaatkan ACFTA sebagai jalur aman dengan memindahkan sebagian produksinya ke kawasan ASEAN. Meskipun relokasi ini terlihat mendorong industrialisasi, sebenarnya kondisi ini justru memperkuat *asymmetric interdependence*, yaitu saling ketergantungan asimetris. Menurut Keohane dan Nye, dalam hubungan yang tidak seimbang, pihak yang lebih kuat bisa memanfaatkan ketergantungan ekonomi pihak lain sebagai alat politik. Dalam konteks ini, kawasan ASEAN berisiko terjebak sebagai proksi rantai pasok subordinat, di mana nilai tambah tinggi dan kontrol teknologi tetap berada di China, sementara ASEAN hanya menjadi tempat produksi saja (Setiawan, 2025).

Masifnya modal China yang masuk melalui mekanisme ACFTA dan skema EHP telah menciptakan keterikatan ekonomi di kawasan semakin menjadi kuat. Menurut Gong (2017), China sengaja memakai intensif ekonomi seperti investasi infrastruktur untuk mengurangi

resistensi negara-negara tetangga terhadap kepentingan geopolitiknya. Ketergantungan ekonomi ini membuat ruang gerak diplomasi ASEAN menjadi terbatas. Besarnya modal dari China bisa menciptakan semacam jebakan investasi, di mana pengaruh politiknya ikut masuk dan bekerja secara tidak seimbang, dan menjadikan negara-negara anggota yang paling rentan secara finansial sebagai *veto player de facto* di dalam internal ASEAN (Habibie et al., 2025). Dampaknya dapat dilihat dari seringnya ASEAN kesulitan mencapai kesepakatan bersama (*Joint Communique*), terutama saat menghadapi isu sensitif seperti konflik di Laut China Selatan, karena beberapa negara anggota yang sangat bergantung secara ekonomi pada China cenderung enggan bersikap tegas (Gong, 2017). Pada akhirnya, dominasi rantai pasok melalui investasi ini tidak hanya berdampak ke ekonomi saja, tapi juga mengurangi kedaulatan politik kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi bisa secara langsung melemahkan sentralitas diplomatik ASEAN.

KESIMPULAN

Secara menyeluruh, restrukturisasi rantai pasok global yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi langsung dari perubahan kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang memaksa China untuk mencari ruang manuver ekonomi baru di kawasan Asia. Perang dagang tersebut telah menjadi katalisator bagi China dalam mempercepat strategi diversifikasi produksi "China+1", di mana ASEAN diposisikan sebagai penyangga ekonomi strategis untuk menghindari tekanan tarif internasional. Integrasi ekonomi melalui kerangka ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA) serta instrumen *Early Harvest Programme* (EHP) terbukti menjadi alat diplomasi ekonomi yang efektif dalam memfasilitasi migrasi perusahaan manufaktur China ke negara-negara seperti Vietnam, Indonesia, dan Thailand.

Namun, hasil analisis dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa lonjakan investasi China pasca 2018 tidak secara otomatis berkorelasi dengan transformasi industri yang mendalam di Asia Tenggara. Realitas di lapangan menunjukkan adanya pola integrasi yang tidak seimbang, di mana negara-negara ASEAN lebih banyak mengambil peran sebagai lokasi produksi berbiaya rendah dan pusat perakitan akhir, sementara aktivitas bernilai tinggi seperti penelitian, pengembangan, dan desain produk tetap tersentralisasi di China. Kondisi ini mencerminkan adanya praktik *embedded hegemony*, di mana keterbukaan pasar dan investasi digunakan sebagai instrumen untuk mengunci komitmen ekonomi regional dalam struktur yang asimetris. Oleh karena itu, investasi tersebut cenderung lebih mengarah pada konsolidasi ketergantungan daripada akselerasi industrialisasi yang sejati. Diperlukan kebijakan industrialisasi domestik yang lebih kuat dan protektif bagi negara-negara ASEAN agar tidak sekadar menjadi perpanjangan wilayah operasional bagi kepentingan ekonomi politik China di masa depan.

REFERENSI

- Alfi, R., Muawal, F., & Ismail, G. (2023). Hubungan Tiongkok dan ASEAN: Upaya Tiongkok menjadi kekuatan hegemon di Asia Tenggara. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*. <https://doi.org/10.23969/transborders.v7i1.10650>
- Amiti, M., Redding, S. J., & Weinstein, D. (2018). The impact of the 2018 trade war on U.S. prices and welfare. *Economia Y Administracion Mirada Fen*, (173), 52. <https://www.nber.org/papers/w25672>
- ASEAN Secretariat. (2024). *ASEAN investment report 2024: ASEAN economic community 2025 and foreign direct investment*. The ASEAN Secretariat. <https://asean.org/book/asean-investment-report-2024/>
- Ba, A. D., & Alice, D. (2006). China-ASEAN relations: The significance of an ASEAN-China Free Trade Area. In *China under Hu Jintao: Opportunities, Dangers, and Dilemmas* (pp. 311–348). World Scientific.

- Ba, H.-L., & Şen, Ö. F. (2024). Explaining variation in national cryptocurrency regulation: Implications for the global political economy. *Review of International Political Economy*, 31(5), 1472–1495. <https://doi.org/10.1080/09692290.2024.2325403>
- Baur, D. G., & Dimpfl, T. (2021). The volatility of Bitcoin and its role as a medium of exchange and a store of value. *Empirical Economics*, 61(5), 2663–2683. <https://doi.org/10.1007/s00181-020-01990-5>
- Baur, D. G., Dimpfl, T., & Kuck, K. (2018). Bitcoin, gold and the US dollar – A replication and extension. *Finance Research Letters*, 25, 103–110. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2017.10.012>
- BenSaïda, A. (2023). The linkage between Bitcoin and foreign exchanges in developed and emerging markets. *Financial Innovation*, 9(1). <https://doi.org/10.1186/s40854-023-00454-w>
- Blackwill, R. D., & Harris, J. M. (2016). *War by other means: Geoeconomics and statecraft*. The Belknap Press of Harvard University Press.
- Cerutti, E., Gopinath, G., & Mourighane, A. (2019). *The impact of US-China trade tensions*. International Monetary Fund (IMF). <https://www.imf.org/en/blogs/articles/2019/05/23/blog-the-impact-of-us-china-trade-tensions>
- Chakraborty, D., & Kumar, A. (2012). ASEAN and China: New dimensions in economic engagement. *China Report*, 48(3), 327–349. <https://doi.org/10.1177/0009445512461972>
- Chahrour, R., & Valchev, R. (2022). Trade finance and the durability of the dollar. *Review of Economic Studies*, 89(4), 1873–1910. <https://doi.org/10.1093/restud/rdab072>
- Chavez-Perez, J., Melgarejo-Espinoza, R., Sevillano-Vega, V., & Iparraguirre-Villanueva, O. (2025). Impact of cryptocurrencies and their technological infrastructure on global financial regulation: Challenges for regulators and new regulations. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 16(4), 802–814. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2025.016048>
- Chen, Y., & Chen, J. (2025). Does the development of host country's digital economy promote China's OFDI? – Evidence from ASEAN countries. *International Journal of Emerging Markets*. <https://doi.org/10.1108/ijoem-12-2024-2154>
- Chin, G., & Stubbs, R. (2011). China, regional institution-building and the China–ASEAN Free Trade Area. *Review of International Political Economy*, 18(3), 277–298. <https://doi.org/10.1080/09692290.2011.561129>
- Emilio. (2022). Pengaruh strategi perang dagang Donald Trump terhadap hubungan dagang Amerika dan Tiongkok. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 16649–16665.
- Flores-Castañeda, R. O., Olaya-Cotera, S., Sánchez Atuncar, G., & Iparraguirre-Villanueva, O. (2025). Systematic review of the global impact of cryptocurrencies: Adoption factors, challenges, environmental effects and cyber risks. *Quality and Quantity*. <https://doi.org/10.1007/s11135-025-02225-4>
- Gandal, N., & Halaburda, H. (2016). Can we predict the winner in a market with network effects? Competition in cryptocurrency market. *Games*, 7(3). <https://doi.org/10.3390/g7030016>
- Gilpin, R. (2001). *Global political economy: Understanding the international economic order*. Princeton University Press.
- Gong, X. (2017). Economic statecraft: An assessment of China's search for influence in Southeast Asia. *International Public Policy Studies*, 22(1), 1–13. <https://doi.org/10.18910/65088>
- Grieco, J. M. (1988). Anarchy and the limits of cooperation: A realist critique of the newest liberal institutionalism. *International Organization*, 42(3), 485–507.

- Habibie, S. Y., Rudiyanto, R., & Said, B. D. (2025). Navigating asymmetric interdependence: A neoliberal institutionalist perspective on ASEAN-China ties. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 49(2), 654–660.
- He, D., & Yu, X. (2016). Network effects in currency internationalisation: Insights from BIS triennial surveys and implications for the renminbi. *Journal of International Money and Finance*, 68, 203–229. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2016.07.009>
- Jiao, Y., Liu, Z., Tian, Z., & Wang, X. (2022). *How did the 2018 U.S.-China trade war affect China's exporters?*. [Working Paper].
- Keohane, R. O. (1984). *After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy*. Princeton University Press.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2012). *Power and interdependence* (4th ed.). Longman.
- Khan, R., Dhaliwal, N., Deorari, R., Anoocha, P., Hussein, A., & Alazzam, M. B. (2023). The way to implement cryptocurrency for international payments and remittances. *2023 3rd International Conference on Advance Computing and Innovative Technologies in Engineering (ICACITE)*, 226–229. <https://doi.org/10.1109/ICACITE57410.2023.10183323>
- Li, H., & Song, T. (2024). Regime dependent dynamics of parallel and official exchange markets in China: Evidence from cryptocurrency. *Applied Economics*, 56(41), 4952–4973. <https://doi.org/10.1080/00036846.2023.2227418>
- Li, Q., Scollay, R., & Maani, S. (2016). Effects on China and ASEAN of the ASEAN-China FTA: The FDI perspective. *Journal of Asian Economics*, 44, 1–19. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2016.05.001>
- Liu, M. (2023). An analysis of development opportunities and challenges for China and ASEAN in the post-epidemic era. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/39/20231939>
- Mada, K. (2023, Oktober 3). Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya butuh AS-China yang sehat. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/asean-butuh-as-china-pulih-dan-berbaikan>
- Mao, H., & Görg, H. W. (2019). *Friends like this: The impact of the US-China trade war on global value chains* (Kiel Working Paper No. 2135). <https://www.ifw-kiel.de/publications/kiel-working-papers/2019/friends-like-this-the-impact-of-the-us-china-trade-war-on-global-value-chains-12967/>
- McDowell, D. (2023). *Bucking the buck: US financial sanctions and the international backlash against the dollar*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197679876.001.0001>
- Medalla, E. M., & Balboa, J. D. (2007). *The impact of ASEAN-China FTA Early Harvest Program: The case of the Philippines with focus on short-run effects on the agriculture sector* (Research Paper Series No. 2007-01). Philippine Institute for Development Studies.
- Middlebrook, P. J., & Tadaa, A. (2024). The rise of China and de-dollarization in a multi-polar digital world. In *The Great Power Competition: The Rise of China* (Vol. 6, pp. 207–221). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-031-70767-4_10
- Office of the United States Trade Representative (USTR). (2018). *Findings of the investigation into China's acts, policies, and practices related to technology transfer, intellectual property, and innovation under Section 301 of the Trade Act of 1974*. Executive Office of the President.
- Ozili, P. K. (2024). Central bank digital currency and the monetary policy and financial stability implications. In *Digital Currency Assets and Challenges to Financial System Stability* (pp. 52–62). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/9798369307700.ch004>

- Palley, T. (2024). Theorizing dollar hegemony: The political economic foundations of exorbitant privilege. In *Dollar Hegemony: Past, Present, and Future* (pp. 20–56). Edward Elgar Publishing Ltd. <https://doi.org/10.4337/9781035320936.00005>
- Paudel, P. (2025). Connecting Asia: The rise of China’s Digital Silk Road in ASEAN countries. *Realism: Law Review*. <https://doi.org/10.71250/rlr.v3i2.75>
- Raicu, S., Costescu, D., Popa, M., & Dragu, V. (2021). Dynamic intercorrelations between transport/traffic infrastructures and territorial systems: From economic growth to sustainable development. *Sustainability*, 13(21). <https://doi.org/10.3390/su132111951>
- Rodrik, D. (2016). Premature deindustrialization. *Journal of Economic Growth*, 21(1), 1–33. <https://doi.org/10.1007/s10887-015-9122-3>
- Salehi, S. H., Shafae, S. M. M., Golmohammadi, V., & Haji-Yousefi, A. M. (2024). China’s de-dollarization policy and its impact on the hegemony of the US dollar. *Countries Studies*, 2(2), 189–220. <https://doi.org/10.22059/jcountst.2023.367816.1075>
- Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS). (n.d.). *The Indonesian agricultural performances under China-ASEAN Free Trade Area: Go up or go down?*.
- Setiawan, A. (2025, Agustus 1). *Perang dagang Amerika-China 2025: Analisis implikasi terhadap ekonomi Asia Tenggara*. Jurnal Asep Setiawan. <https://asepsetiawan.com/2025/08/01/perang-dagang-amerika-tiongkok-2025-analisis-implikasi-terhadap-ekonomi-asia-tenggara/>
- Skopiec, D. (2025). The prospects for the US dollar as the dominant international currency. *Bank i Kredyt*, 56(5), 557–592. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0055.3048>
- Sreevas, V. T. K., Hendra, H., Kulkarni, P., Pandiya, B., & Sharma, A. K. (2024). International cooperation in fintech regulation. In *Examining Global Regulations During the Rise of Fintech* (pp. 163–186). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3803-2.ch007>
- Taguchi, H., & Zhao, J. (2022). China’s global value chain linkage and logistics performances in emerging ASEAN economies. *International Studies of Economics*, 17(2), 126–155. <https://doi.org/10.1002/ise3.12>
- Universitas Airlangga. (2024, Mei 22). *Perang dagang Amerika dan China di ASEAN*. <https://unair.ac.id/perang-dagang-amerika-dan-china-di-asean/>
- Wu, H., & Riemenschnitter, A. (2018). Introduction. *Interventions*, 20(8), 1073–1084. <https://doi.org/10.1080/1369801x.2018.1538810>
- Zein, A. W., Siregar, C. M., Haykal, M., & Hasibuan, D. (2026). Neraca perdagangan (balance of trade), neraca pembayaran (balance of payment) dan pinjaman negara: Rumusan masalah tujuan penelitian. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 459–465.
- Zhai, H. (2023). Evaluation of China-ASEAN trade status and trade potential: An empirical study based on a gravity model. *PLOS ONE*, 18(9), e0290897. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290897>
- Zhang, F., Cui, Y., & Campbell-Verduyn, M. (2024). Digital RMB vs. Dollar Hegemony? Friendly Foes in China-US Currency Competition. *Journal of Chinese Political Science*, 29(3), 483–508. <https://doi.org/10.1007/s11366-023-09876-w>